
Kontradiksi konservasi: Wilayah Ka'apor di Amazon Brazil

Bagian timur Amazon Brazil mempunyai tingkat deforestasi dan degradasi hutan tertinggi di negara Brazil. Namun, masih terdapat wilayah-wilayah luas yang berada dalam kondisi perlindungan yang baik di wilayah yang luas ini, yang—seperti dibuktikan oleh studi ilmiah dari berbagai belahan dunia—biasanya berhubungan dengan wilayah Masyarakat Adat dan/atau komunitas lokal. (1) Salah satu wilayah tersebut adalah wilayah adat Alto Turiaçu tempat tinggal Masyarakat Ka'apor, yang terbentang seluas 530.524 hektar di enam kotamadya di bagian barat laut negara bagian Maranhão. Ini adalah rumah bagi populasi setidaknya 2.600 orang di 20 komunitas. Ini adalah wilayah adat terbesar di Amazon Timur, dan juga merupakan bagian terbesar dari hutan hujan yang dilestarikan di wilayah tersebut.

Merawat wilayah: Siapa yang mengajari siapa?

Kepedulian terhadap hutan, yang oleh para akademisi dan sektor sosial lainnya disebut sebagai konservasi, didasarkan pada—antara lain—nilai-nilai dan hubungan mendalam dengan wilayah hutan; ini termasuk nilai-nilai budaya, adat istiadat, spiritual dan politik. Pengetahuan dan praktik tradisional mereka memungkinkan mereka memanfaatkan dan merawat wilayah tersebut secara bersamaan. Konsep dan pengetahuan ini tidaklah statis; sebaliknya, mereka berkembang seiring dengan budaya mereka dan beradaptasi serta merespons kebutuhan yang muncul. Inilah cara masyarakat Ka'apor menciptakan, misalnya, strategi pemantauan dan pengawasan berbasis masyarakat.

Masyarakat Ka'apor telah menghadapi banyak ancaman eksternal. Selama bertahun-tahun, invasi terhadap wilayah adat semakin meningkat, dan bahkan pejabat publik pun terlibat dalam penyerangan, penyewaan tanah, dan penggunaan dokumen palsu untuk menyalahgunakan wilayah adat. Menghadapi situasi ini, sejumlah besar pemimpin desa berkumpul pada tahun 2012 dan mulai merancang kegiatan pengawasan mandiri. Mereka mendirikan komunitas-komunitas kecil di pintu masuk jalan yang digunakan oleh para penebang, yang kemudian mereka sebut kawasan lindung, atau ka'a usakha dalam bahasa mereka. Ini adalah salah satu pengalaman sukses menetralkan agresi dan invasi ke wilayah mereka.

Pada bulan September 2013, Ka'apor menciptakan kawasan lindung pertama di kotamadya Centro Novo do Maranhão, di mana, pada bulan Desember tahun yang sama, mereka memutuskan untuk mengembalikan sistem organisasi yang disebut *Tuxa Ta Pame*, atau Dewan Manajemen Ka'apor. "Ini adalah bentuk organisasi leluhur dan kolektif masyarakat, yang mengingatkan kembali dan merujuk pada *Tuxa kuno*; para pejuang yang meninggalkan jejak mereka dalam sejarah karena berjuang dan mengorbankan nyawa mereka, karena menjadi ahli pengetahuan dan budaya, dan karena menjadi ahli strategi dalam membela masyarakat dan budaya mereka," anggota Dewan menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan WRM. Dalam sistem ini tidak ada bos, pemimpin, pemimpin politik atau pihak lain yang berkuasa; keputusan tidak dibuat oleh seorang pemimpin, melainkan oleh masyarakat, secara berkelompok dan kolektif. "Semua orang penting dan punya peran utama dalam pertahanan [wilayah]. Ketika ada aksi bela diri, seluruh kelompok akan ikut serta. Tidak ada yang mengaku mengarahkan orang lain, tapi semua orang yang merasa terancam akan datang ke konfrontasi, "imbuh mereka.

Mereka juga menciptakan *Jupihu Katu Ha*, yang merupakan perjanjian Ka'apor seputar aturan hidup berdampingan. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan menjalankan pemerintahan bersama dan saling bertanggung jawab. *Tuxa Ta Pame* didasarkan pada keputusan konsensual, horizontal dan partisipatif.

Relevansi keputusan-keputusan ini harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan otonomi dan kedaulatan. Dengan memiliki bentuk pemerintahan dan organisasi yang inklusif – jauh dari model seperti demokrasi perwakilan – Ka'apor memberikan ruang bagi suara dan partisipasi langsung dari berbagai kelompok masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah dibentuknya pasukan pembela masyarakat Ka'apor, yang terdiri dari keluarga, perempuan, orang tua, anak-anak, dan bahkan hewan peliharaan. Setiap orang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, setiap orang yang tinggal di dalamnya, menikmati, mengambil alih, dan bertanggungjawab mempertahankan wilayahnya.

Seiring waktu, dan dengan meningkatnya serangan dan ancaman, Ka'apor telah memperluas tindakan pertahanan terhadap teritorial mereka. Mereka telah menerapkan bentuk perlindungan baru melalui pengawasan berbasis masyarakat dan melakukan proses partisipatif untuk memetakan ekosistem biokultural Ka'apor. Mereka bahkan telah mengadopsi dan menerapkan sistem agroforestri sintropis, yaitu sistem pertanian dan produktif yang diciptakan beberapa dekade lalu yang meniru hutan hujan dan pengaturannya—khususnya dengan mengurangi input eksternal, serta akumulasi dan pembuangan energi. Hal ini semua berjalan seiring dengan aksi solidaritas terkait pendidikan dan kesehatan.

Namun, seiring dengan meningkatnya pengawasan berbasis masyarakat, penyerangan dan pembunuhan juga meningkat—tindakan yang melibatkan penebang kayu, pemilik tanah, pemburu, pedagang, dan politisi lokal. Dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 50 anggota komunitas telah diserang, dua komunitas telah diserang, dan terjadi hampir 15 pembunuhan.

Meskipun banyaknya tragedi, sebagian besar hutan yang dikelola oleh Ka'apor masih utuh. Baru-baru ini, orang luar yang tidak mengenal wilayah tersebut telah datang. Mereka mengajari Ka'apor cara melakukan apa yang telah mereka lakukan selama berabad-abad—melindungi wilayah mereka. Mereka menganjurkan proyek REDD. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya yang perlu belajar mengenai hubungan dengan hutan dan merawatnya? Benarkah orang luar ini datang dengan niat semata-mata menjaga hutan?

Kedatangan proposal REDD dan dampak yang diantisipasi

Pada awal tahun 2023, perusahaan Wildlife Works dan LSM Forest Trends, keduanya dari Amerika Serikat, tiba di wilayah Ka'apor dengan proposal untuk melaksanakan proyek REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) yang akan menghasilkan dan menjual kredit karbon. Mereka tiba karena diperkenalkan oleh masyarakat adat dari negara bagian Pará.

Asosiasi Ka'apor *Ta Hury* dari Sungai Gurupi adalah organisasi lain di wilayah tersebut. Asosiasi tersebut memiliki seorang ketua yang menjalin komunikasi dekat dengan perusahaan dan LSM tersebut. Asosiasi ini, yang tidak mewakili seluruh Ka'apor, mengatakan mereka setuju dengan proyek tersebut. Mereka mengatakan proyek ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan menyediakan sumber daya untuk melengkapi kegiatan perlindungan hutan. Hingga saat ini, nota kesepahaman pun telah ditandatangani. *Tuxa Ta Pame* mengecam dokumen ini, karena baik perusahaan maupun LSM tidak mendengarkan dan melibatkan mereka dalam proses penandatanganan dokumen tersebut.

Seperti yang terjadi di banyak wilayah lain di seluruh dunia di mana hutan yang paling dilindungi ditemukan dan diperebutkan untuk proyek kredit karbon, masyarakat dan komunitas adatlah yang membayar dampaknya. Kedatangan pengumuman proyek saja sudah menimbulkan perselisihan dan perpecahan internal.

Ka'apor menentang usulan proyek REDD karena hal tersebut mengkomodifikasi cara hidup mereka dan meningkatkan konflik internal. Mereka mengetahui hal ini secara langsung karena mereka juga pernah mengalami hal serupa dengan proyek komersialisasi kayu kering yang terjadi di wilayah mereka pada tahun 2006 hingga 2013. Dalam kasus tersebut, mereka merasa ditipu oleh pihak-pihak yang melibatkan mereka dalam proyek tersebut, termasuk negara sendiri, pemerintah federal, dan bahkan National Indian Foundation (FUNAI, dengan akronim bahasa Portugis). Proyek komersialisasi meninggalkan konflik, serta kematian dan penderitaan, sebuah pengalaman yang tidak ingin terulang oleh Ka'apor. (2) Sayangnya, kehadiran pihak luar dan proyek yang mereka usulkan saat ini telah menimbulkan konflik dan perpecahan yang semakin mendalam di kalangan masyarakat Ka'apor.

Karena jangka waktu situasi yang ada, pengaduan telah diajukan ke Kementerian Publik Federal (MPF, dalam akronim bahasa Portugis), sebuah entitas yang menyatakan bahwa setiap proses yang melibatkan konsultasi sebelumnya harus mencakup dialog dengan kedua kelompok, dan bahwa konsensus harus mencerminkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. (3)

Ketika Beto Borges, perwakilan Forest Trends, ditanya tentang apa yang akan dilakukan LSM tersebut jika Ka'apor tidak mencapai konsensus, ia mengatakan bahwa proyek tersebut tidak akan dilanjutkan— hal ini menunjukkan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan sebesar ini. Namun, tanggapan dari perwakilan Wildlife Works, Lider Sucre, sangat berbeda karena ia tidak menganggap konsensus sebagai sesuatu yang penting. Sebaliknya, ia menekankan keputusan kolektif: "Tidak akan pernah ada kebulatan suara yang utuh. Dalam suatu proses kemasyarakatan selalu ada sudut pandang yang berbeda. Di akhir proses, kami akan mematuhi keputusan bersama, apakah itu mendukung atau menentang". (4) Namun, hal ini segera menimbulkan pertanyaan: Apa yang dipahami oleh pejabat perusahaan mengenai 'keputusan bersama'? Bagaimanapun, sebagian dari masyarakat telah secara bersama-sama memutuskan untuk menolak proyek tersebut.

Sesuai dengan modus operandi organisasi sejenis, Forest Trends dan Wildlife Works mulai menyebarkan informasi yang bias mengenai REDD; sementara itu, ada informasi yang sangat penting yang mereka sembunyikan. Misalnya, mereka belum berbagi informasi dengan Ka'apor mengenai ketidakberesan, keluhan dan dampak proyek REDD lainnya yang melibatkan Wildlife Works, di beberapa negara seperti Kenya, Republik Demokratik Kongo, dan Kamboja. (5)

Pada bulan November 2023, surat kabar The Guardian menerbitkan laporan (6) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Kenya dan LSM SOMO (7), yang mendokumentasikan tuduhan terhadap staf Wildlife Works di proyek Kasigau di Kenya. Staf senior tersebut dituduh melakukan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan selama lebih dari satu dekade. Laki-laki di perusahaan ini menggunakan posisi mereka untuk menuntut seks sebagai imbalan atas promosi dan fasilitas atau perlakuan yang lebih baik. Investigasi yang dilakukan oleh sebuah firma hukum di Kenya menemukan bukti adanya "perilaku yang sangat tidak pantas" yang dilakukan oleh dua orang di perusahaan ini.

Presiden Wildlife Works sendiri, Mike Korchinsky, meminta maaf atas penderitaan yang ditimbulkan dan melaporkan bahwa tiga orang telah diskors—dan menekankan bahwa masalah ini bukanlah masalah besar. Perlu dicatat bahwa ini adalah reaksi yang sangat umum yaitu meremehkan

signifikansi atau tingkat penyalahgunaan proyek semacam ini (8) dan bersikeras bahwa insiden yang dilaporkan adalah kasus yang terisolasi. Namun, terulangnya peristiwa ini dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa masalah ini sebenarnya bersifat sistemik.

Masalah mendasar di balik situasi serius ini adalah bahwa proyek-proyek REDD didorong dan dipromosikan hanya sebagai intervensi positif bagi masyarakat dan wilayah, tanpa menyebutkan sejarah dampak negatifnya. Artinya, informasi penting – lengkap, jujur, dan tidak memihak – disembunyikan dari masyarakat yang akan mengambil keputusan mengenai suatu proyek di wilayah mereka.

Bagaimana tanggapan *Tuxa Ta Pame* dari Ka'apor?

Setelah mereka mengidentifikasi ancaman tersebut, *Tuxa Ta Pame* memutuskan bahwa mereka perlu mencari lebih banyak informasi yang memungkinkan mereka memahami secara komprehensif tentang mekanisme REDD, cara kerjanya, apa dasarnya, dan apa dampaknya terhadap populasi dan masyarakat wilayah tersebut.

Setelah *Tuxa Ta Pame* memulai proses penelitiannya, aktor eksternal datang untuk memberikan penjelasan yang sederhana dan bias mengenai REDD dan pembentukan kredit karbon untuk membiayai proyek tersebut, yang mereka klaim akan mulai memberikan manfaat kepada masyarakat hanya dengan menandatangani lembar kehadiran di pertemuan tersebut. Namun, para anggota Ka'apor telah melakukan investigasi, mencari sudut pandang lain, dan yang paling penting, mempelajari pengalaman dari komunitas lain mengenai masalah ini. Hal inilah yang mendasari mereka mencapai kesimpulan mereka sendiri.

Dewan *Tuxa Ta Pame* dan masyarakat dibawah organisasi ini sangat memahami REDD sebagai “mekanisme kapitalis yang tersamar yang membuat dunia tercemar dan mengancam otonomi wilayah. Karena hal ini mengalihkan tanggung jawab dari pemerintah ke pihak swasta. Karena hal ini menciptakan perpecahan dan menghasilkan uang dari sumber daya alam. . Kami selalu mempertahankan wilayah ini, karena kami percaya hutan adalah hidup kami. Kami tidak perlu menerima uang untuk hidup dan melindungi hutan”. (9)

Berdasarkan pemahaman tentang REDD tersebut, mereka memutuskan untuk membawa topik tersebut ke dalam proses pendidikan dan pelatihan yang berlangsung di tiga pusat pelatihan yang memberikan arahan bagi lima pusat pendidikan budaya dan masyarakat Ka'apor. Topik tersebut telah menjadi bagian dari kegiatan sekolah dan pelatihan, dan mereka membuat buku dasar bilingual tentang topik tersebut. Hingga akhir tahun 2023, mereka telah melaksanakan kegiatan pelatihan selama tujuh bulan. Hal ini memunculkan inisiatif untuk membuat protokol komunitas otonom Ka'apor yang saat ini sedang dibangun.

Lalu apa yang diperlukan agar hutan tetap lestari?

Perlu adanya jaminan kondisi bagi Ka'apor untuk tetap berada di wilayahnya secara aman dan layak; Hal ini berarti, antara lain, menghormati bentuk organisasi politik, pengambilan keputusan, dan pengelolaan wilayah serta penghidupan mereka sendiri. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa proyek-proyek sejenis REDD – yang seringkali menimbulkan konflik dan dampak bahkan sebelum proyek tersebut disetujui atau dilaksanakan – umumnya dibangun di wilayah dengan tingkat perlindungan yang sudah baik, seperti dalam kasus di Alto Turiaçu. Masyarakat Ka'apor lah yang menjamin kondisi-kondisi ini, berdasarkan pengetahuan, praktik, hubungan dan pertahanan wilayah mereka tanpa memerlukan proyek dari luar atau mekanisme pasar yang membatasi atau mengontrol apa yang "seharusnya" dilakukan oleh orang-orang yang mempromosikan proyek dan mekanisme ini.

Artikel ini disusun oleh Sekretariat WRM berdasarkan wawancara dengan anggota Dewan Pengurus Ka'apor *Tuxa Ta Pame* .

- (1) Porter-Bolland L. et al, 2012. Land use, cover change, deforestation, protected areas, community forestry, tenure rights, tropical forests. *Forest ecology and management*. Vol 268:6-17
- (2) Video: [Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflito indígena para lucrar com reparação ambiental](#), 2023.
- (3) Article: [Intercept Brasil, Empresa americana alimenta conflito indígena para lucrar com reparação ambiental](#), 2023.
- (4) Idem 3
- (5) [REDD-Minus: the rethoric and reality of the Mai-N´dombe REDD+ Programme](#), 2020; [Fortress conservation in Wildlife Alliance's Southern Cardamom REDD+ Project: Evictions, violence, and burning people's homes](#). "We're proud of our work. The forest, the wildlife, you come to feel they're yours". 2021.
- (6) The Guardian, [Allegations of extensive sexual abuse at Kenyan offsetting project used by Shell and Netflix](#), November 2023.
- (7) SOMO, [Offsetting human rights. Sexual abuse and harassment at the Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenya](#), November 2023.
- (8) WRM, [15 Years of REDD: A mechanism Rotten at the Core](#), April 2022. .
- (9) Interview with members of the Tuxa Ta Pame Ka'apor Management Council.